

# **IMPLEMENTASI UU DESA KEBERHASILAN DAN PERMASALAHANNYA**

Editor:  
Mohammad Mihrob

**Judul:**

Implementasi UU Desa: Keberhasilan dan Permasalahannya

**Perpustakaan Nasional:**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

x+86 hlm.; 16 x 24 cm

**ISBN:**

Cetakan Pertama, 2019

**Penulis:**

Debora Sanur

**Copy Editor:**

Mohammad Mihrob

**Desain Sampul:**

Fajar Wahyudi

**Tata Letak:**

Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bekerjasama dengan:**

Inteligensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341- 573650 Fax. 0341-588010

redaksi.intrans@gmail.com

www.intranspublishing.com

# Kata Pengantar

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanNya Penulis akhirnya dapat menyelesaikan buku ini. Segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagiNya.

Buku ini sangat diilhami oleh pengalaman Penulis dalam mendukung Tim Pendampingan Pembahasan RUU Tentang Desa, serta kegiatan penelitian tim, kegiatan pengumpulan data maupun kegiatan kunjungan kerja Badan Legislatif DPR RI yang diikuti oleh penulis terkait dengan Sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Sumber informasi dan data yang digunakan dalam buku ini berasal dari amanat UU Desa itu sendiri serta pandangan berbagai *stakeholders* yang turut mengimplementasikan UU Desa tersebut. Selain itu, untuk melakukan pendalaman Penulis juga melakukan kegiatan diskusi terfokus oleh kalangan akademisi dan pakar desa.

UU Desa telah membuka posisi desa untuk memiliki wewenang pada proses demokratisasi, perencanaan dan keuangan sendiri. UU Desa mendorong agar setiap perangkat desa mampu melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. UU Desa juga membuka jalan bagi desa untuk secara partisipatif menjadi bagian dari perencanaan daerah.

Hal ini terbukti, setelah UU Desa diberlakukan banyak desa yang mengalami kemajuan signifikan. Ditemukan beberapa desa yang telah maju serta berhasil dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya karena melaksanakan pemberdayaan desa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Desa. Desa yang berhasil tersebut di antaranya ialah Desa Panggungharjo dan Desa Ponggok. Kedua desa tersebut berhasil mengembangkan potensi daerahnya serta meningkatkan

## **iv Implementasi UU Desa: Keberhasilan dan Permasalahannya**

kualitas sumber daya masyarakatnya hingga menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.

Meskipun demikian, secara umum implementasi otonomi desa belum berjalan dengan optimal. Masih ditemui berbagai masalah dan kendala dalam mengimplementasikan UU Desa tersebut. Beberapa kendala yang kerap ditemui ialah masalah kualitas sumber daya manusia, kesulitan desa dalam pengoperasian sistem aplikasi, masalah pendampingan, maupun yang kurang optimalnya peran pemerintah supra-desa, dalam hal ini kabupaten, dalam mendorong desa dalam mengembangkan potensi wilayahnya. Oleh sebab itu masih diperlukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dari pemerintah pusat maupun pemerintah supra-desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa melalui implementasi UU Desa.

Akhirnya Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, utamanya dalam mengawal implementasi UU Desa di Indonesia. Penulis menyadari ada banyak kekurangan atas buku ini. Untuk itu, Penulis minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, terutama dari para pihak-pihak terkait yang telah menjadi objek tulisan ini. Penulis juga menerima masukan yang konstruktif demi tercapainya desa yang semakin mandiri, maju dan sejahtera melalui keberadaan UU Desa.

Terima kasih.

**Debora Sanur**

*(Peneliti kepakaran Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia Pusat  
Penelitian BKD DPR RI)*

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Gambar dan Tabel .....	vii
Daftar Singkatan .....	viii

## BAB I

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
--------------------------	----------

A. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Tentang Desa .....	1
A.1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .....	1
A.2. Rancangan Undang-Undang Tentang Desa .....	5
B. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa .....	8

## BAB II

<b>IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA .....</b>	<b>13</b>
A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	13
A.1. Pemerintahan Desa .....	13
A.2. Kepala desa .....	17
A.3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	21
A.4. Aparat Desa .....	22
A.5. Perencanaan Desa .....	24
B. Dana Desa .....	28
C. Badan Usaha Milik Desa .....	34

**vi Implementasi UU Desa: Keberhasilan dan Permasalahannya**

D. Keberhasilan Desa .....	40
D.1. Desa Ponggok .....	41
D.2. Desa Panggunharjo .....	45

**BAB III**

<b>MASALAH DALAM IMPLEMENTASI UU DESA .....</b>	<b>49</b>
---	-----------

A. Tantangan dalam implementasi UU Desa	49
B. Pelanggaran di Desa	56

**BAB IV**

<b>PERAN PUSAT TERHADAP DESA .....</b>	<b>61</b>
--	-----------

**BAB V**

<b>PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
----------------------	-----------

Index .....	79
-------------	----

Biografi Penulis .....	85
------------------------	----

# Daftar Gambar dan Tabel

Gambar 1: Keterkaitan Para Pemangku Kepentingan .....	10
Gambar 2: Skema Kemandirian Desa Panggunharjo .....	23
Gambar 3: Tabel Pendapatan Desa Panggunharjo .....	31
Tabel 1. Perbandingan Kewenangan .....	63

# Daftar Singkatan

APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani
ICW	: <i>Indonesian Corruption Watch</i>
Kapolri	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KUR BRI	: Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia
LPJ	: Laporan Pertanggung Jawaban
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Musdes	: Musyawarah Desa
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musrembangdes	: Musyawarah Pembangunan Desa
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pokdakan	: Kelompok Pembudidayaan Ikan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPK	: Program Pengembangan Kecamatan
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT	: Rukun Tetangga
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RW	: Rukun Warga
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia



Siskeudes	: Sistem Keuangan Desa
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UPL	: Unit Pengelola Lingkungan
UPS	: Unit Pengelola Sosial
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU Desa	: Undang-Undang Desa
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal:

- Abe, Alexander. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka, 2005.
- Adi, Isbandia Rukminto. *Pemberdayaa, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Arif, Syaiful. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang, 2006.
- Atmosudirdjo, S. Prayudi *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 2002.
- Belareq, Florentinus. Peran Kepala desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 2, 2017: 701 – 710, hal 702-704
- Eko, Sutoro. dkk, *desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: FPPD, 2007.
- Sutardjo, Kartohadikoesoemo P, *desa*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984.
- Koswara, E., *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta, Bina Aksara, 2001.
- Kuncoro, Mudrajat. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Marlina, Henny. “Fungsi Kepala desa dalam Pelaksanaan Pembangunan”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 3, 2017: 1309-1320.
- Ndraha, Talizuduhu. *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Nugroho, Riant. 2003. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

- Siagian, Sondang P. *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika, 2005.
- Wasistiono, Sadu. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*, dalam *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2007.

**Website:**

- Ada 9 Kasus Dana desa Bermasalah, Inspektorat Tahun Ini Turun Pantau Kepala desa, [http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/28/ada-9-kasus-dana-desa-bermasalah-inspektorat-tahun-ini-turun-pantau-Kepala desa](http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/28/ada-9-kasus-dana-desa-bermasalah-inspektorat-tahun-ini-turun-pantau-Kepala%20desa), 1 Agustus 2018.
- Draft Policy Brief Mempertanggung Badan Usaha Milik desa Menggerakkan Ekonomi desa, [http://keDesa.id/id\\_ID/wiki/draft-policy-brief-mempertanggung-badan-usaha-milik-desa-menggerakkan-ekonomi-desa/](http://keDesa.id/id_ID/wiki/draft-policy-brief-mempertanggung-badan-usaha-milik-desa-menggerakkan-ekonomi-desa/), 1 Agustus 2018.
- ICW Sebut Pak Kepala desa Paling Banyak Korupsi Dana desa, [https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-Kepala desa-paling-banyak-korupsi-dana-desa](https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-Kepala%20desa-paling-banyak-korupsi-dana-desa), diakses 8 Juni 2018.
- Jokowi Ingin Pangkas Pihak Ketiga Penyerap Dana desa, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171018213339-78-249319/jokowi-ingin-pangkas-pihak-ketiga-penyerap-dana-desa>, 29 Agustus 2018.
- Jokowi Ubah PP Penyaluran Dana desa Kini Melalui Rekening Kas desa, <https://news.detik.com/berita/3185224/jokowi-ubah-pp-penyaluran-dana-desa-kini-melalui-rekening-kas-desa>, Diakses 1 Agustus 2018.
- Kapolri Ungkap Modus Penyelewengan Dana desa, <https://www.liputan6.com/news/read/3134743/kapolri-ungkap-modus-penyelewengan-dana-desa>, 1 Agustus 2018.

Kenapa Banyak Kepala desa bermasalah Gara-gara Dana desa, [https://acehsatu.com/kenapa-banyak-Kepala desa-bermasalah-gara-gara-dana-desa/](https://acehsatu.com/kenapa-banyak-Kepala%20desa-bermasalah-gara-gara-dana-desa/), diakses 7 Juni 2018.

Lurah Desa Panggunharjo Pemerintah desa Efektif bila didukung Kepercayaan Warga, <http://jogjadaily.com/2015/11/lurah-desa-panggunharjo-pemerintah-desa-efektif-bila-didukung-kepercayaan-warga/>, diakses 1 Agustus 2018.

Pendatang Baru di Jakarta di Prediksi capai 70 Ribu Orang, <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/12/090787118/pendatang-baru-di-jakarta-diprediksi-capai-70-ribu-orang> diakses tanggal 21 Juli 2016

Pengertian Undang-Undang desa dan Keistimewaannya, <http://www.keuanganDesa.com/2017/03/pengertian-Undang-Undang-desa-dan-keistimewaannya/> diakses 7 Mei 2018

Polri Temukan 214 Kasus Penyalahgunaan Dana desa, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171020112724-12-249704/polri-temukan-214-kasus-penyalahgunaan-dana-desa>, 1 Agustus 2018.

Uang Jokowi Sebut Ada 900 Kepala desa Bermasalah Akibat Penyalahgunaan Dana desa, <https://www.merdeka.com/uang-jokowi-sebut-ada-900-kepala-desa-bermasalah-akibat-penyalahgunaan-dana-desa.html>, 8 Juni 2018.

11 Kasus Penyalahgunaan dana desa di Jateng Diorises Hukum, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3668489/11-kasus-penyalahgunaan-dana-desa-di-jateng-diproses-hukum>, diakses 7 Juni 2018

### **Sumber lain**

Berdasarkan wawancara dengan Nanang Mujiyanto Kasub Pemdes Pemerintah Kabupaten bagian Pemerintahan desa pada tanggal 10 Mei 2017, di kantor Pemerintah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan wawancara dengan Sukirman, Ketua BPD, pada tanggal 9 Mei 2017, di Balai Desa Panggungharjo.

Berdasarkan wawancara dengan Sutanto, Inspektorat Daerah, pada tanggal 10 Mei 2018 di Kantor Inspektorat Kabupaten Bantul.

Berdasarkan wawancara dengan Wahyudi, berdasarkan wawancara di Desa Panggungharjo 9 Mei 2017

Hasil dari Expert Meeting tentang BUMDes yang diselenggarakan PATTIRO di Hotel Sofyan Inn, Tebet, Jakarta, 3 Agustus 2016.

Junaedi Mulyono, Paparan disampaikan saat pelaksanaan Kunjungan Badan Legislatif DPR RI ke Desa Ponggok pada 22-24 Maret 2018

Naskah Akademik RUU tentang desa, Direktorat Pemerintahan desa Dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, tahun 2007.

Sutoro Eko, Paparan disampaikan dalam FGD tanggal 8 Mei di kampus APMD Yogyakarta.



# Index

## A

adat istiadat 49  
administratif 4, 5, 8, 11, 32, 34,  
55, 69, 75, 76  
akuntabel 29, 43, 51, 67, 73  
Akuntabilitas 61, 73  
Alokasi Dana Desa 9, 50  
anggaran 9, 13, 32, 33, 34, 56,  
57, 58, 62, 65, 66, 73, 74  
anggaran desa 58, 73, 74  
aparatus 20, 22, 23, 40, 45, 54, 55,  
58, 66, 67  
APBDes 11, 25, 26, 53, 54, 68  
asal-usul 2, 5, 10, 17, 28  
aspirasi 15, 20, 22, 25, 28, 39,  
72, 74  
ayat 2, 10, 32, 33

## B

Bappenas 52  
bottom up 3, 9, 24, 51  
BPD 9, 10, 11, 19, 21, 22, 25,  
53, 63, 72, 77  
BPKP 64, 66, 67, 68  
BUMDES 37

BUMDes 10, 11, 16, 19, 34, 35,  
36, 37, 38, 39, 40, 43, 44,  
51, 53, 68, 69, 71, 77

## D

Daerah 1, 4, 8, 9, 15, 25, 32, 35,  
64, 66, 74, 75, 77  
Dalam Negeri 1, 4, 6, 34, 46, 66  
Dana desa 16, 28, 34, 50, 57, 58,  
62, 65, 66, 75, 76, 77  
demokrasi 3, 4, 6, 7, 14, 15, 22,  
56, 61, 72, 73  
demokratis 3, 8, 22, 25, 26, 29,  
42, 46, 49, 51  
demokratisasi 3, 8, 25, 29, 51  
Desa 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,  
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,  
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43,  
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  
52, 53, 54, 56, 59, 61, 64,  
66, 67, 68, 71, 76, 77  
Desa adat 4  
desa administratif 4  
Desa Panggunharjo 15, 16, 17,  
18, 19, 22, 23, 24, 26, 27,



- 30, 31, 36, 41, 45, 46, 47, 48, 76, 77
- Desa Ponggok 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 77
- Desa Wisata 37, 38, 39, 41
- desentralisasi 1, 2, 5, 6, 34
- E**
- efektif 29, 44, 46, 67, 72, 74, 76
- ekonomi 6, 7, 8, 14, 16, 17, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 42, 43, 46, 50, 58, 62, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 76
- embung 57, 58
- F**
- fungsi 18, 21, 22, 26, 35, 39, 40, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 68, 69, 71, 72
- G**
- gagasan 49
- Gapoktan 37
- H**
- hak asal-usul 2, 5, 17
- I**
- ICW 56, 57, 76
- implementasi 1, 3, 31, 50, 51, 59, 67, 68, 72
- Indikator 46
- Indonesia 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 56, 66, 74, 75
- Inspektorat 15, 52, 62, 75, 77
- instansi 59
- internal 26
- K**
- Kapolri 66, 76
- kebijakan 7, 8, 15, 21, 22, 25, 26, 29, 35, 41, 43, 51, 56, 59, 61, 62, 63, 67, 68, 73, 74
- Kecamatan 18, 25, 41, 75
- Kelurahan 1, 4, 6, 46
- Kementerian Dalam Negeri 46, 66
- Kementerian Desa 32, 35, 53
- kemiskinan 7, 9, 13, 26, 27, 28, 30, 32, 58
- Kepala desa 11, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 39, 44, 45, 56, 57, 58, 62, 75, 76, 77
- kesejahteraan 2, 4, 6, 8, 9, 24, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 42, 46, 48, 58, 62, 71, 72, 74
- kesenjangan 8, 24, 30
- Kewenangan 1, 10, 11, 50, 64
- kolektif 15, 45, 72
- korupsi 13, 32, 56, 57, 73, 76
- L**
- laporan 33, 43, 54, 57, 62, 66, 67, 68, 71

- lembaga 11, 15, 16, 22, 23, 26,  
29, 37, 44, 64, 65, 66, 73
- lingkungan 16, 17, 19, 25, 27,  
28, 38, 42, 43, 46, 47, 48
- lokal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13,  
14, 17, 24, 28, 34, 37, 42,  
47, 49, 51, 53, 55, 62, 71
- LPJ 52
- M**
- mandiri 1, 2, 4, 6, 8, 9, 16, 17,  
23, 24, 29, 30, 31, 34, 37,  
39, 40, 41, 46, 49, 61, 68,  
71, 75
- masalah 4, 6, 7, 25, 26, 28, 30,  
37, 38, 40, 50, 51, 52, 53,  
54, 56, 57, 58, 59, 62, 64,  
65, 66, 72, 73, 75, 76, 77
- Masyarakat 1, 4, 5, 6, 21, 25, 27,  
34, 36, 37, 53, 54, 59, 61,  
74, 75
- misi 18, 30, 31, 40, 41, 42, 46, 48
- mobilisasi 13, 56, 62
- modal 16, 19, 38, 39, 43, 44, 63
- monitoring 43, 57, 62
- mufakat 10, 22, 37, 72
- Musdes 9, 10, 22
- N**
- negara 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14,  
15, 28, 29, 49, 55, 56, 61,  
65, 66
- NKRI 5, 6, 9
- O**
- Optimalisasi 43
- otonom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14,  
24, 51
- otonomi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 51
- P**
- partisipasi 9, 15, 16, 25, 26, 27,  
29, 30, 35, 40, 42, 43, 47,  
48, 56, 69, 72, 73
- partisipatif 7, 8, 9, 17, 24, 25, 26,  
37, 43, 48, 51, 62, 64
- Pasal 2, 7, 10, 32, 33
- pelayanan 2, 6, 7, 8, 9, 15, 16,  
22, 24, 26, 28, 35, 43, 48,  
55, 59, 61, 62, 63, 64, 73
- Pembangunan 3, 7, 18, 25, 30,  
35, 39, 41, 44, 64, 66, 67,  
74, 75
- pemberdayaan 16, 17, 25, 28,  
33, 37, 39, 40, 46, 64
- Pemerintah 1, 4, 6, 9, 13, 15, 17,  
18, 19, 20, 32, 37, 46, 50,  
54, 56, 68, 69, 71, 73, 74,  
75, 76, 77
- pemerintah daerah 3, 51, 53, 66,  
67, 68
- Pemerintah desa 9, 17, 37, 46,  
56, 73, 74, 76

- pemerintah pusat 1, 3, 34, 35, 51, 61, 62, 68, 72
- pendamping desa 52, 53, 58
- pendampingan 38, 51, 52, 54, 67
- pengaturan 1, 2, 3, 4, 7, 8, 25, 33, 35, 54, 64, 69, 71
- pengawasan 16, 21, 22, 48, 51, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68
- pengelolaan 6, 7, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 57, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 73
- Penyalahgunaan 57, 58, 66, 77
- peran pemerintah 68
- perangkat desa 24, 28, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65
- peraturan 2, 3, 5, 25, 32, 33, 54, 56, 66, 69, 71, 72, 73
- Peraturan Pemerintah 32, 50
- Perencanaan 3, 20, 24, 25, 26, 74
- permasalahan 4, 7, 30, 37, 53, 54, 56, 64, 73
- pertanggungjawaban 29, 57, 65, 71, 72
- Pokdakan 37
- polri 66, 76, 77
- prasarana 16, 24, 25, 27, 38, 39, 42, 74
- Presiden 32, 57, 58, 65
- private 15
- produktif 16, 40, 43
- program 25, 26, 34, 36, 41, 42, 45, 50, 53, 54, 59, 65, 72
- provinsi 2, 18, 35, 53, 62, 71
- pusat 1, 3, 5, 14, 18, 34, 35, 51, 52, 61, 62, 68, 71, 72, 74
- R**
- regulasi 4, 8, 13, 15, 29, 41, 62, 63, 66, 68
- rekognisi 2, 49, 51, 69, 71
- Rekonstruksi 20, 75
- responsif 7, 48, 74
- responsivitas 15, 73
- RPJMDes 25, 26, 41, 43, 71
- RUU 1, 4, 5, 6, 77
- S**
- sarana 16, 24, 25, 27, 38, 39, 42, 46, 74
- sector 15, 44
- sejahtera 2, 4, 6, 8, 9, 24, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 42, 46, 48, 49, 58, 62, 71, 72, 74
- sosial 3, 6, 8, 14, 16, 26, 28, 35, 37, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 55, 61, 63, 64, 66, 69, 72, 73
- state 4, 15
- subsidiaritas 28, 51

- substantif 73
- sumber daya 6, 7, 13, 17, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 45, 62, 73
- sumber daya alam 7, 37, 38, 45, 62
- sumber daya manusia 28, 29, 38, 45
- supra desa 68, 71
- T**
- Tahun 1, 2, 3, 4, 7, 8, 24, 28, 30, 34, 36, 41, 43, 62, 75
- tanah kas desa 46, 61
- Tanah Ulayat 10
- tanggungjawab 29, 47, 52, 57, 65, 71, 72
- tata kelola 13, 19, 29, 31, 42, 43, 48, 51, 64, 65, 71
- teknologi informasi 42, 44
- tenaga kerja 58
- transparansi 15, 59, 61, 72, 73
- tugas pembantuan 2, 11
- tugas pokok 51, 68
- tujuan 2, 8, 9, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 45, 48, 54, 65, 66, 67, 68, 71
- U**
- Undang-Undang 1, 4, 5, 7, 8, 22, 54, 77
- Undang-Undang Dasar 1945 7
- Undang-Undang desa 22, 77
- Unit Pengelola Lingkungan 37
- Unit Pengelola Sosial 37
- urbanisasi 7
- UU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 24, 25, 29, 31, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 64, 67, 68, 77
- V**
- visi 15, 18, 26, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 72
- W**
- warga 7, 9, 17, 23, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 53, 55, 72, 73, 76
- wewenang 18, 51, 57, 72
- wilayah 2, 3, 4, 5, 10, 22, 37, 44, 52, 69



## Biografi Penulis

**Debora Sanur L.** Penulis lahir di Jakarta, 31 Oktober 1982. Pada tahun 2005 menyelesaikan pendidikan S1 pada Universitas Kristen Indonesia jurusan Hubungan Internasional dan pada tahun 2008 menyelesaikan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia. Penulis merupakan Peneliti Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia sejak tahun 2009. Pada tahun 2012 hingga 2014 Penulis turut masuk dalam tim pendamping Pansus RUU tentang Pemerintahan Daerah serta Tim pendamping Pansus RUU tentang desa. Selain ke dua RUU tersebut penulis juga turut dalam Tim Pendamping pembahasan RUU Ketahanan Nasional dan RUU Wawasan Kebangsaan. Beberapa Karya Tulis Ilmiah yang telah dipublikasi melalui buku dan jurnal antara lain ialah “Urgensi Membangun Parlemen Modern” (2015), “Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional” (2016), dan “Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah” (2016).

